



INDONESIA INDICATOR

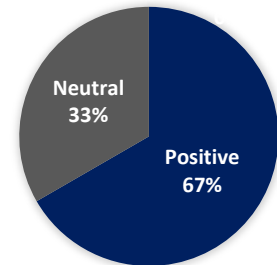
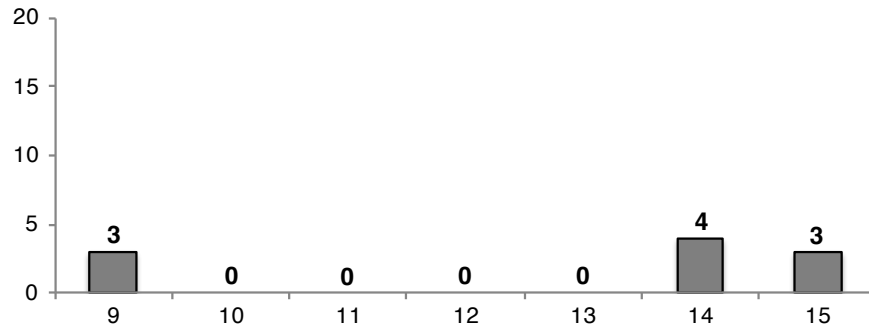
LAPORAN MEDIA CETAK

**Wakil Gubernur Jawa Tengah
(15 Mei 2025)**

Summary

Media	News	Positive	Neutral	Negative
1	3	2	1	0

Daily Statistic



Media Share

-

Influencers

-

Table Of Contents : 15 Mei 2025

No	Date	Media	News Title	Page	Sentiment	Influencers
1	15 Mei 2025	Jateng Pos	Rommy, Sandiaga, hingga Amran Masuk Bursa Ketum PPP	7	Neutral	
2	15 Mei 2025	Jateng Pos	Realisasi Pendapatan Pajak Jareng Capai Rp 3,77 Triliun	1	Positive	
3	15 Mei 2025	Jateng Pos	Jateng Bentuk Satgas Sampah	12	Positive	

Title	Rommy, Sandiaga, hingga Amran Masuk Bursa Ketum PPP		
Media	Jateng Pos	Reporter	dtc/muz
Date	2025-05-15	Tone	Neutral
Page	7	PR Value	

Rommy, Sandiaga, hingga Amran Masuk Bursa Ketum PPP

JAKARTA- PPP akan menggelar muktamar sekitar Agustus atau September untuk memilih ketua umum (ketum) dan pengurus DPP. Sejumlah nama seperti Sandiaga Uno, Muhammad Romahurmuziy atau Rommy, hingga Amran Sulaiman masuk bursa calon Ketua Umum PPP.

"Pelaksanaan Muktamar PPP setelah menghadapi Hari Raya Idul Adha dan pilkada ulang di beberapa daerah, sehingga diputuskan antara Agustus-September, ini masih tentatif," kata juru bicara (jubil) PPP Usman Muhammad Tokan dalam

keterangannya, Rabu (14/5).

Nama-nama yang masuk dalam bursa ketum itu berasal dari internal dan eksternal PPP. Pihak eksternal itu, kata dia, ada yang telah melakukan konsolidasi hingga bertemu dengan sejumlah pimpinan DPW PPP.

"Kalau benar yang terdengar dari eksternal ini akan maju menjadi orang nomor satu di PPP, kita sambut baik dan berharap apabila tidak terpilih tetap bergabung dan berjuang membesarkan PPP untuk merebut kembali kejayaan PPP di Pemilu 2029 yang akan datang," sebutnya. Usman mengatakan internal partai

menghendaki adanya ketua umum baru di Muktamar PPP. Pemilihan ketua umum bagi PPP perlu cepat dilakukan agar memiliki waktu sebelum 2029.

"Perlu dicatat bahwa PPP saat ini masih dipimpin oleh plt ketua umum, bukan ketum hasil muktamar. Seperti halnya Pak Suharto Monoarfa menjadi Plt Ketum PPP, partai segera melaksanakan muktamar untuk memilih Ketum PPP yang baru, maka terpilih Pak Suharto menjadi ketum baru PPP.

Berikut daftar nama yang masuk dalam bursa calon ketum PPP; dari

internal PPP: Muhamad Mardiono, Muhammad Romahurmuziy, Sandiaga Salahuddin Uno, Amir Uskara, dan Taj Yasin Maimoen.

Eksternal PPP: Syaifulah Yusuf (Menteri Sosial), Andi Amran Sulaiman (Menteri Pertanian), dan Agus Suparmanto (eks Menteri Perdagangan).

Sebelumnya, Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi saat DPW PPP Jawa Timur menggelar halalbihalal yang dihadiri oleh kader Jatim serta pengurus DPP PPP, mengatakan DPW PPP Jatim telah satu suara untuk mengusung perubahan pada



ISTIDOK KOMPAS

Jokowi saat menghadiri acara PSI.

Muktamar 2025 ini.

"Jadi sudah diamanatkan Muktamar di antara Agustus atau September. Penting untuk DPW mengkonsolidasikan kekuatan struktur, bahwa PPP Jatim juga kompak dan solid untuk mengusung agenda perubahan di Muktamar 2025," kata Arwani di Kantor DPW

PPP Jatim, Minggu (11/5), dilansir dari detikcom.

Arwani menyebut sebanyak 20 DPW PPP se Indonesia termasuk dari Jatim sepakat ingin memilih Ketua Umum PPP yang baru. Hal ini juga selaras dengan keinginan majelis partai dan para ulama di PPP. (dtc/muz)

Title	Realisasi Pendapatan Pajak Jareng Capai Rp 3,77 Triliun		
Media	Jateng Pos	Reporter	
Date	2025-05-15	Tone	Positive
Page	1	PR Value	



Realisasi Pendapatan Pajak Jateng Capai Rp3,77 Triliun



KETERANGAN: Gubernur Ahmad Luthfi di dampingi Wagub Taj Yasin dan Sekda Sumarno, tengah memberikan keterangan media terkait realisasi pendapatan pajak Provinsi Jawa Tengah capai Rp 3,77 Triliun.

SEMARANG – Realisasi pendapatan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah hingga 30 April 2025 mencapai Rp3,77 triliun. Jumlah itu mengalami tren positif, karena persentasenya sudah sebesar 29,81 persen atau melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 27,79%.

Dari jumlah itu terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp1,248 triliun, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp456,650 miliar, Pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan sebesar Rp874,209 miliar, dan Pajak Rokok sebesar Rp1,180 triliun.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan tepat waktu. Ia mengimbau agar warga tak lagi menunda kewajiban terse-

but dengan alasan menunggu program pemutihan.

“Yang ingin memanfaatkan program pemutihan (pajak), ini saya imbau masyarakat untuk segera, karena batas waktunya sampai tanggal 30 (Juni). Ini menjadi tanggung jawab masyarakat sebagai wajib pajak,” ujar Luthfi saat Rapat Koordinasi Pengendalian Operasi Kegiatan (POK) yang membahas realisasi kinerja APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, di kantornya pada Rabu, 14 Mei 2025.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang sedang berlangsung di Jawa Tengah mencakup pembebasan atau penghapusan tunggakan nilai pokok pajak beserta denda yang berlaku. Program ini dimulai sejak 8 April hingga 30 Juni 2025.

Luthfi mengimbau agar ke-

depan tidak ada lagi budaya menunda-nunda membayar pajak sambil menunggu pemutihan.

“(Tahun) 2026 nanti, (masyarakat) harus (taat) bayar pajak. Karena pemutihan seoyangnyakan hanya bagi mereka (kendaraan) yang sudah mati. Pajak itu kewajiban yang harus dibayar,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan proses pengawasan dan penagihan pajak kendaraan bermotor akan diperkuat hingga ke level terbawah. Nantinya, tidak hanya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang bergerak, tapi juga pemerintah desa akan dilibatkan secara aktif.

“Penagihannya nanti akan ikut dilakukan juga oleh pemerintah desa, dalam rangka menghadirkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor,” tambahnya. (adv/ucl)

Title	Jateng Bentuk Satgas Sampah		
Media	Jateng Pos	Reporter	Jan
Date	2025-05-15	Tone	Positive
Page	12	PR Value	

Jateng Bentuk Satgas Sampah

Jalankan Perintah Prabowo Atasi Zero Sampah 2029

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi akan membentuk satuan tugas (satgas) pengelolaan sampah di wilayahnya. Hal ini menyusul target nasional dari Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan Indonesia mencapai penyelesaian masalah sampah pada tahun 2029.

Menurut Luthfi, Jawa Tengah tidak hanya siap mengikuti arahan pusat, tetapi ingin mengambil posisi sebagai daerah yang paling siap, paling progresif, dan bisa menjadi contoh dalam pengelolaan sampah berbasis lingkungan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa pembentukan satgas tidak bisa ditunda, mengingat persoalan sampah di sejumlah daerah perlu segera diintervensi.

"Artinya kita harus dahului, harus bikin satgas. Kita harus punya intervensi di kabupaten/kota yang punya problem. Satgas untuk bersama menyelesaikan masalah bersama," ujar Luthfi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasi Kegiatan (POK) yang membahas realisasi kinerja APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, di kantornya pada Rabu, 14 Mei 2025.

Luthfi menambahkan, satgas ini akan dirancang seperti tim Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan di Jateng—berbasis provinsi, bekerja lintas sektor, dan memiliki waktu gerak yang cepat.

"Saya pengin (Jateng) punya role model-nya. Nanti bikin satgas kayak MBG, kita punya tim khusus, jadi



Artinya kita harus dahului, harus bikin satgas. Kita harus punya intervensi di kabupaten/kota yang punya problem. Satgas untuk bersama menyelesaikan masalah bersama

AHMAD LUTHFI
(Gubernur Jateng)

kita punya tim provinsi khusus sampah. Kita akselerasi, dalam waktu dua minggu harus punya role model untuk kabupaten/kota," tegasnya.

Satgas ini sekaligus menjadi bagian dari kesiapan Jawa Tengah dalam menggelar Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah se-Indonesia yang direncanakan akan digelar di Kabupaten Banyumas, Juni 2025.

Menurut Luthfi, darurat sampah di Jawa Tengah adalah persoalan yang harus segera dituntaskan.



Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.

Ia mengaku telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dalam menyusun langkah-langkah percepatan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah Widi Hartanto menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan pembentukan satgas secara cepat bersama kabupaten/kota.

DLHK juga telah melakukan pembinaan terhadap daerah-daerah yang sebelumnya sempat mendapatkan sanksi administratif dari Kementerian LHK.

"Satgas sampah sudah disiapkan,

dan akan kami siapkan secara cepat dengan kabupaten/kota. Informasi terakhir dari Menteri LHK, akan ada rapat koordinasi sampah se-Indonesia di Banyumas sekitar bulan Juni," ujar Widi.

Ia menambahkan bahwa progres di sejumlah daerah seperti Kabupaten Karanganyar sudah menunjukkan peningkatan, termasuk rencana pembangunan TPA baru dan peningkatan anggaran pengurangan.

Di sisi lain, sejumlah inovasi pengelolaan sampah juga telah dijalankan di Jawa Tengah. Di antaranya TPST Jeruklegi, Cilacap yang mengolah 150 ton sampah/

hari menjadi RDF (Refuse Derived Fuel), TPST BLE, Banyumas yang menghasilkan RDE, paving block, dan magot.

Kemudian TPA Putri Cempo, Solo yang mengelola 450 ton sampah/hari menjadi energi listrik melalui PLTSa berkapasitas 5 MW/hari. TPST Regional Magelang yang tengah dikembangkan dengan dukungan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), berkapasitas 200 ton/hari.

Selain itu Program pengembangan desa mandiri sampah dengan capaian 88 desa selama 2023–2024. Pengembangan pengolahan sampah di TPA Kabupaten Rembang,

Temanggung, dan Jepara, masing-masing dengan kapasitas 100 ton/hari.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin mendukung langkah ini dengan menyoroti keberhasilan Kabupaten Banyumas sebagai contoh pengelolaan sampah berbasis komunitas yang berhasil dan bernilai ekonomi.

"Banyumas itu sudah bisa mandiri dalam mengelola sampahnya. Bahkan ada nilai ekonominya juga. Sudah kerja sama dengan pabrik semen. Artinya ini bisa ditiru, bisa direplikasi. Tinggal bagaimana kita satukan dalam pola kerja yang terstruktur," ujar Taj Yasin. (*)/jan